



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

PENGUMUMAN
NOMOR : 19/PL.02.2-Pu/2172/2024

TENTANG
PENERIMAAN MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT
PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang mengumumkan Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

No		Nama Lengkap Calon	Status (Mantan Terpidana/ Terpidana)	Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon/Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon
1.	Wali Kota	Hj. Rahma, S.IP., M.M.	Tidak	Memenuhi Syarat
	Wakil Wali Kota	Rizha Hafiz, S.Pd.I., M.Pd.	Tidak	Memenuhi Syarat

2.	Wali Kota	H. Lis Darmansyah, SH	Tidak	Memenuhi Syarat
	Wakil Wali Kota	Drs. H. Raja Ariza, M.M.	Tidak	Memenuhi Syarat

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan atas calon dan/atau Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 melalui:

1. Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan pada laman: <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur “tanggapan” dengan cara:
 - a. memilih tahapan “Pencalonan Peserta Pemilihan Kepala Daerah”
 - b. memilih kategori “Tanggapan terhadap Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah”
 - c. memilih calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan
 - d. mengisi data identitas pemberi masukan dan tanggapan masyarakat
 - e. mengisi jenis masukan dan tanggapan berupa:
 - 1) dukungan atas calon dan/atau pasangan calon,
 - 2) masukan dan tanggapan masyarakat terkait: pasangan calon, status sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya, dan/atau hasil penelitian persyaratan administrasi calon/penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
 - f. menuliskan uraian.
 - g. mengunggah dokumen yaitu: KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.
 - h. menekan “SUBMIT”
2. secara luring ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang dengan alamat Jl. Handjoyo Putro KM. 8 Atas No. 11 – 13, penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat secara luring dilakukan dengan cara:
 - a. mengisi daftar hadir.
 - b. mengisi formulir Model TANGGAPAN. MASYARAKAT.KWK.
 - c. menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud huruf b kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang
 - d. menyerahkan fotokopi KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang mengumumkan visi, misi dan program pasangan calon sebagaimana terlampir.

Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap calon dan/atau Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang pada tanggal 15 - 18 September 2024.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 14 September 2024
Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Tanjungpinang,



Novira Damayanti

Visi- Misi Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota

Hj. Rahma, S.IP, MM – Rizha Hafiz, S.Pd.I, M.Pd

(RAMAH)

Dari dokumen yang tertuang dalam RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA TANJUNGPINANG 2025 - 2045 terdapat tujuh permasalahan pokok Tanjungpinang diantaranya yaitu:

1. Belum Optimalnya pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu 2013 – 2023 cenderung menurun yaitu dari 7,78% pada tahun 2013 menjadi sebesar 4,92% pada tahun 2023.
2. Persentase Penduduk Miskin masih tinggi Angka Kemiskinan dari tahun 2013 – 2023 cenderung turun namun pada angka yang masih cukup tinggi yaitu 7,95% pada tahun 2023.
3. Kualitas SDM masih rendah IPM Kota Tanjungpinang 79,64.
4. Masih terdapat kesenjangan Gender IPG Kota tanjungpinang sebesar IPG dari tahun 2013– 2022 meningkat, IPG tahun 2022 sebesar 97,14, IDG masih dalam kategori sedang, kesetaraan gender masih belum maksimal dengan angka 76,64.
5. Penyediaan infrastruktur belum optimal dan belum merata. Cakupan pelayanan sanitasi pada tahun 2022 sebesar 99,83% mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018, yaitu 98,55%. Persentase Rumah tangga dengan Akses Air bersih pada tahun 2022 sebesar 65,90% meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 64,78%. Persentase Kawasan Kumuh pada tahun 2022 sebesar 0,199%, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 0,55%. Persentase RTH tahun 2022 sebesar 12,39%. Persentase Infrastruktur Kondisi Baik, pada tahun 2022 72,09% dibandingkan dengan tahun 2018 meningkat dari sebesar 66,20%. Persentase Jalan Kondisi Mantap pada tahun 2022 sebesar 88,64%, meningkat dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 68,20%.

6. Kualitas lingkungan hidup masih rendah dan tingginya resiko bencana IKLH dari tahun 2018 - 2022 menunjukkan kecenderungan Meningkat Pada 2018 IKLH 56,52 pada tahun 2022 62,72.
7. Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik belum optimal. Indeks Reformasi Birokrasi walaupun meningkat sejak tahun 2018 namun pada angka yang cukup yaitu 69,30, Nilai SAKIP cukup yaitu sebesar 73,27 pada tahun 2022 dibanding tahun 2018 turun. Nilai SAKIP pada tahun 2018 sebesar 77,6.

Dari permasalahan pokok diatas, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang **Hj. Rahma, S.IP, M.M – Rizha Hafiz, S.Pd.I, M.Pd** merumuskan visi-misi dan program sebagai berikut;

Visi

"Mewujudkan Tanjungpinang sebagai kota yang maju, berdaya saing, sejahtera, religius dan berbudaya berbasis partisipasi masyarakat dan inovasi berkelanjutan."

Misi

1. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyediaan fasilitas dan tenaga pendidik yang kompeten serta mendorong program beasiswa dan pelatihan bagi generasi muda atau milenial untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan mengembangkan sistem pelayanan publik yang cepat, tepat, dan transparan serta mendorong penggunaan teknologi informasi dalam layanan pemerintahan.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM, industri kreatif serta meningkatkan akses permodalan dan pelatihan bagi pelaku usaha kecil dan menengah berbasis digital marketing
4. Mengembangkan program-program sosial untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran serta memperkuat sistem jaminan sosial dan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat.

5. Mengembangkan potensi pariwisata lokal berbasis budaya dan sejarah Tanjungpinang dengan memperkuat identitas budaya melalui kegiatan seni dan budaya yang melibatkan masyarakat.
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, transportasi, dan fasilitas umum lainnya dengan strategi mengembangkan infrastruktur ramah lingkungan dan berkelanjutan.
7. Memperkuat koordinasi dengan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan upaya meningkatkan program pencegahan kejahatan dan narkoba di lingkungan masyarakat.
8. Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan serta mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan kepedulian sosial.

Program-Program untuk Mengoperasionalkan Visi-Misi

1. Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

- a. Bantuan kelengkapan sekolah bagi siswa baru berupa baju seragam, tas, buku, sepatu dan kaos kaki untuk siswa SD dan SMP
- b. Pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi dari keluarga pra sejahtera.
- c. Program pelatihan kerja bagi lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi untuk meningkatkan keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri.
- d. Kerjasama dengan perusahaan untuk program magang dan penempatan kerja.
- e. Renovasi dan pembangunan sekolah-sekolah yang memerlukan perbaikan.
- f. Penyediaan sarana dan prasarana belajar yang modern seperti laboratorium komputer dan perpustakaan digital.
- g. Pelatihan berkelanjutan bagi guru dan tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas pengajaran.

- h. Optimalisasi Quran Center untuk mencetak generasi berakhlak mulia serta sebagai tempat pusat pendidikan, pengajaran dan penghafal Quran
- i. Pemberian insentif lembaga kemasyarakatan seperti RT/RW, Guru TPQ, serta siswa-siswi SD/SMP berprestasi.
- j. Pembinaan atlet dan pemberian insentif bagi atlet yang berprestasi serta apresiasi berupa insentif untuk pelatih.

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

- a. Optimalisasi Mall Pelayanan Publik dengan mengimplementasikan sistem pelayanan online untuk administrasi kependudukan, perizinan, dan layanan publik lainnya.
- b. Pengembangan aplikasi mobile untuk akses informasi dan layanan publik.
- c. Pelatihan dan peningkatan kapasitas pegawai negeri sipil dalam penggunaan teknologi informasi.
- d. Membangun gedung kelurahan yang baru dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik yang nyaman bagi masyarakat.
- e. Merevitalisasi Gedung BPPRD dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan peningkatan PAD.

3. Pengembangan Ekonomi Daerah, UMKM dan Industri Kreatif

- a. Penyediaan fasilitas inkubasi bisnis dan pelatihan kewirausahaan berbasis digital marketing.
- b. Penyaluran dana bergulir dan kredit mikro dengan bunga rendah.
- c. Pameran dan festival produk lokal untuk meningkatkan pemasaran dan jaringan usaha.
- d. Bantuan perlengkapan usaha dan fasilitasi iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk pelaku UMKM.

- e. Menyelenggarakan Pasar murah dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai stakeholder terkait dalam rangka menekan inflasi di Kota Tanjungpinang.

4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Kesehatan

- a. Peluncuran program bantuan sosial berbasis data yang terintegrasi untuk memastikan bantuan mencapai kelompok yang paling membutuhkan.
- b. Program pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan seperti lansia, difabel, dan keluarga pra sejahtera.
- c. Membangun kerjasama dengan sektor swasta untuk pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang kesejahteraan sosial.
- d. Peningkatan jumlah dan kualitas puskesmas dengan layanan 24 jam.
- e. Penyediaan layanan kesehatan keliling.
- f. Membantu atau fasilitasi iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk masyarakat pra sejahtera, nelayan, petani dan pelaku UMKM.
- h. Pembinaan kelompok penjahit melalui koperasi.
- i. Penyediaan rumah singgah bagi masyarakat yang berobat dan dirujuk di Batam dan Jakarta.

5. Pelestarian Budaya dan Pariwisata

- a. Penyelenggaraan festival tahunan yang menampilkan kekayaan budaya lokal seperti tari, musik, perahu naga dan kuliner.
- b. Promosi pariwisata berbasis budaya melalui media sosial dan kerjasama dengan travel blogger/influencer.
- c. Pengembangan paket wisata terpadu yang menggabungkan wisata alam, sejarah, dan budaya.

- d. Revitalisasi kawasan wisata sejarah dan peninggalan budaya di Tanjungpinang serta pelestarian budaya tidak benda.
- e. Pengembangan fasilitas pendukung pariwisata seperti penginapan, transportasi, dan pusat informasi wisata.
- f. Pelatihan bagi pelaku wisata lokal untuk meningkatkan standar layanan.
- g. Revitalisasi Gedung LAM sebagai pusat pengembangan dan pelestarian budaya Melayu

6. Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

- a. Pembangunan dan perbaikan jalan raya, jembatan, dan trotoar untuk mendukung mobilitas masyarakat.
- b. Pengembangan sistem transportasi publik yang terintegrasi, ramah lingkungan dan pembangunan jalur sepeda.
- c. Penyediaan fasilitas parkir yang memadai dan strategis untuk mengurangi kemacetan serta meningkatkan retribusi.
- d. Pembangunan taman kota, ruang terbuka hijau, dan jalur pedestrian untuk meningkatkan kualitas hidup warga.
- e. Program penghijauan kota melalui penanaman pohon dan taman vertikal di area perkotaan.
- f. Pengembangan sistem pengelolaan limbah dan air yang efisien dan ramah lingkungan.
- g. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana rumah ibadah
- h. Peningkatan jumlah penerangan jalan umum.
- i. Pembangunan gedung pemuda dan olahraga serta sarana-prasarana penunjang untuk mengakomodir kreatifitas pemuda / milineal.
- j. Optimalisasi penggunaan aset Pemda Bintan dan PT Antam.

7. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban

- a. Pemasangan CCTV di titik-titik strategis untuk memantau dan mencegah tindak kriminal.
- b. Patroli rutin oleh satuan keamanan di wilayah-wilayah rawan kejahatan.
- c. Pelatihan dan pemberdayaan masyarakat dalam program siskamling dan keamanan lingkungan.
- d. Kerjasama dengan BNN dan kepolisian untuk program penyuluhan dan pencegahan narkoba di sekolah dan komunitas.
- e. Pembentukan tim reaksi cepat untuk menangani kasus-kasus kriminalitas.
- f. Penyediaan dan pengadaan alat pemadam kebakaran untuk daerah pesisir.

8. Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan

- a. Penyelenggaraan musyawarah warga secara rutin untuk mendengarkan aspirasi dan usulan masyarakat.
- b. Pembentukan forum komunikasi antara pemerintah kota dan perwakilan masyarakat untuk diskusi kebijakan publik.
- c. Pengembangan portal online untuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
- d. Pelatihan manajemen organisasi bagi komunitas dan LSM lokal untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam berkontribusi pada pembangunan.
- e. Dukungan dana hibah dan pendampingan teknis untuk program-program inovatif dari masyarakat.
- f. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan budaya melalui program kerja bakti dan gotong royong.

Demikianlah visi-misi dan program Pasangan Calon Walikota – Wakil Walikota Tanjungpinang Hj. Rahma, S.IP, M.M – Rizha Hafiz, S.Pd.I, M.Pd. Semoga menjadi komitmen untuk membangun Tanjungpinang Lebih Maju.

PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG
PERIODE 2024-2029



Hj. RAHMA, S.IP, M.M
CALON WALIKOTA



RIZHA HAFIZ, S.Pd.I, M.Pd
CALON WAKIL WALIKOTA



BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang akan diselenggarakan secara serentak pada tanggal 27 November 2024 akan diikuti oleh seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, termasuk juga di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.

Pemilihan Kepala Daerah tersebut merupakan momentum strategis untuk meletakkan dasar-dasar dan arah pembangunan untuk periodeisasi 2025-2030. Oleh karena itu merupakan sesuatu hal yang penting, jika sejak tahap awal perjalanan pemerintahan dipandu oleh Visi dan Misi yang jelas, sistematis, terukur, realistis dan terintegrasi dengan permasalahan pembangunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungpinang.

Sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang memiliki berbagai potensi untuk dikembangkan dalam rangka mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan disemua sektor yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga dibutuhkan perencanaan yang dilandasi dengan pemikiran yang komprehensif, terfokus, dan terintegrasi,



VISI DAN MISI

H. LIS DARMANSYAH, SH – Drs. H. RAJA ARIZA, MM



BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG

yang didasarkan pada pemahaman atas segala situasi dan kondisi yang akan dihadapi. Dengan demikian maka setiap perencanaan pembangunan yang disusun, diharapkan mampu menjadi pedoman dalam menentukan langkah-langkah dan strategi bagi penyelesaian setiap permasalahan pembangunan yang perlu dibenahi.

Proses perencanaan pembangunan yang perlu dilakukan yaitu melalui 4 (empat) pendekatan yang ideal, yakni pendekatan politis, pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, dan pendekatan sinergitas. Keterpaduan perencanaan dari empat pendekatan tersebut akan melahirkan arah dan tujuan utama yang ingin dicapai daerah. Dimana tujuan utama pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui polarisasi perencanaan program kegiatan yang meliputi seluruh sektor pembangunan, yang dituangkan dalam bentuk Visi dan Misi untuk kemudian diimplementasikan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Visi dan Misi Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang pada Pilkada Tahun 2024, pada prinsipnya untuk mengevaluasi pelaksanaan RPJMD periode 2018-2023 yang dipandang belum secara optimal terlaksana dengan baik. Berdasarkan evaluasi tersebut, maka dirumuskan berbagai perencanaan yang dipandang lebih efektif dan tepat, sebagai arah pembangunan dimasa yang akan datang. Perencanaan tersebut akan dituangkan nantinya dalam RPJMD untuk Periode 2025-2030, sehingga menjadi acuan dan arah pembangunan di Kota Tanjungpinang untuk masa 5 (lima) tahun yang akan datang.





VISI DAN MISI

H. LIS DARMANSYAH, SH – Drs. H. RAJA ARIZA, MM



BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG

2. KONDISI UMUM KOTA TANJUNGPINANG



Kota Tanjungpinang merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Riau. Nama Tanjungpinang diambil dari posisinya yang menjorok ke laut yang oleh orang Melayu disebut Tanjung. Tanjung tersebut ditumbuhi oleh pohon pinang yang menjadi tanda bagi pelayar yang akan memasuki kawasan sungai Bintang atau Hulu Riau.

Sejak tahun 1983, Kota Tanjungpinang berstatus sebagai kota administratif. Namun setelah era reformasi, kota ini diperjuangkan peningkatan statusnya menjadi sebuah kota otonom. Sejalan dengan UU No 5 Tahun 2001, Tanjungpinang pun menjadi kota otonom dan tidak lagi berada di bawah Kabupaten Kepulauan Riau, serta pemerintahannya berjalan efektif sejak 16 Januari 2002.

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1-1-6117 Tahun 2022 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, luas wilayah Kota Tanjungpinang adalah 150,37KM2. Kota Tanjungpinang berbatasan langsung





VISI DAN MISI

H. LIS DARMANSYAH, SH – Drs. H. RAJA ARIZA, MM



BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG

dengan Kota Batam dan Kabupaten Bintan dengan batas administratif sebagai berikut :

- a) Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pangkil Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan;
- b) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bintan Timur dan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan;
- c) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan; dan
- d) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan.

Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 wilayah kecamatan dan 18 kelurahan, yaitu :

- a) Kecamatan Tanjungpinang Barat, terdiri dari:
 - 1) Kelurahan Tanjungpinang Barat;
 - 2) Kelurahan Kemboja;
 - 3) Kelurahan Bukit Cermin;
 - 4) Kelurahan Kampung Baru.
- b) Kecamatan Tanjungpinang Timur, terdiri dari:
 - 1) Kelurahan Batu IX;
 - 2) Kelurahan Pinang Kencana;
 - 3) Kelurahan Air Raja;
 - 4) Kelurahan Melayu Kota Piring;
 - 5) Kelurahan Kampung Bulang.
- c) Kecamatan Tanjungpinang Kota, terdiri dari:
 - 1) Kelurahan Tanjungpinang Kota;
 - 2) Kelurahan Kampung Bugis;
 - 3) Kelurahan Senggarang;
 - 4) Kelurahan Penyengat.
- d) Kecamatan Bukit Bestari, terdiri dari:
 - 1) Kelurahan Tanjungpinang Timur;
 - 2) Kelurahan Tanjung Unggat;
 - 3) Kelurahan Sungai Jang;
 - 4) Kelurahan Tanjung Ayun Sakti;
 - 5) Kelurahan Dompak.





VISI DAN MISI

H. LIS DARMANSYAH, SH – Drs. H. RAJA ARIZA, MM



BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG

Sedangkan jumlah penduduk Kota Tanjungpinang mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, dengan rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 1,5% per tahun. Secara umum, pertumbuhan penduduk di Kota Tanjungpinang mengalami pertumbuhan yang stabil dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Penduduk Kota Tanjungpinang tergolong sedang, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Kota Tanjungpinang memiliki daya tarik bagi penduduk dari luar daerah. Faktor kelahiran di Kota Tanjungpinang masuk dalam kategori tinggi, sedangkan faktor kematian dan migrasi yang juga mempengaruhi tingkat pertumbuhan penduduk masuk kedalam kategori rendah.

Penduduk Kota Tanjungpinang didominasi oleh usia produktif (15-64 tahun). Dimana berdasarkan data BPS Kota Tanjungpinang Tahun 2023, 27,4% penduduk dengan usia 0-14 tahun, sedangkan 68,2% merupakan penduduk dengan usia 15-64 tahun, dan 4,4% penduduk usia 65 tahun ke atas. Ditinjau dari jenis kelamin, rasio jenis kelamin menunjukkan angka 101,58 tahun 2023, yang artinya terdapat 101 laki-laki untuk seriap 100 perempuan. Ditinjau dari jumlahnya, jumlah laki-laki lebih sedikit lebih besar (50,7%) dibandingkan jumlah penduduk perempuan (49,3%).

Tabel
Administratif Kota Tanjungpinang

KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JML RW	JML RT	WILAYAH (KM)	PENDUDUK (RIBU JIWA)
TANJUNGPINANG BARAT	4	42	204	4,55	42,71
TANJUNGPINANG KOTA	4	28	70	35,42	19,22
BUKIT BESTARI	5	42	177	45,64	52,59
TANJUNGPINANG TIMUR	5	54	222	58,95	120,32
KOTA TANJUNGPINANG	18	166	673	144,56	234,84

Sumber Data BPS Kota Tanjungpinang Tahun 2024





BAB II

POTENSI KOTA TANJUNGPINANG

Posisi astronomis Kota Tanjungpinang berada antara 00 50' 25,93" LU 00 58' 54,62" LU dan 1040 23' 23,40" BT - 1040 34' 49,9" BT. Kota Tanjungpinang memiliki kedudukan dan peranan ekonomis yang penting. Posisi Kota Tanjungpinang sangat strategis, disamping berdekatan dengan Kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, dan Negara Singapura sebagai pusat perdagangan dunia, Kota Tanjungpinang juga terletak pada posisi silang perdagangan dan pelayaran dunia, antara timur dan barat, yakni di antara Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan. Wilayah Kota Tanjungpinang terdiri dari daratan, lautan dan beberapa pulau seperti Pulau Dompok, Pulau Penyengat, Pulau Terkulai, Pulau Los, Pulau Basing, Pulau Sitakap dan Pulau Bayan.

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah Kota Tanjungpinang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata, perdagangan dan jasa, industri, pengolahan dan lain-lain. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang tahun 2014-2034, kawasan yang dapat dikembangkan terdiri dari :

- 1) Kawasan perumahan;
- 2) Kawasan industri;
- 3) Kawasan perkantoran;
- 4) Kawasan perdagangan dan jasa;
- 5) Kawasan pariwisata;
- 6) Kawasan peruntukan ruang untuk kegiatan sektor informal;
- 7) Kawasan Pusat Pendidikan.



VISI DAN MISI

H. LIS DARMANSYAH, SH – Drs. H. RAJA ARIZA, MM



BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG

Struktur perekonomian Kota Tanjungpinang dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha selama kurun waktu lima tahun didominasi oleh empat sektor utama, yaitu sektor konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, dan sektor Industri Pengolahan. Namun terdapat juga beberapa sektor yang berpotensi berkembang, seperti Pariwisata khususnya Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Perikanan, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan, Real Estate serta Industri Pengolahan khususnya dari sumber daya kelautan dan perikanan.

Berdasarkan PP No. 13 Tahun 2017, menempatkan Kota Tanjungpinang sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) diantara kota atau kabupaten lain di Indonesia. Kota ini diharapkan dapat mendukung kepentingan pembangunan nasional dan dimasukkan dalam kategori II/C/1, berada pada tahap pengembangan, revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional. Sebagai kota PKW maka pembangunan kota harus diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dirinya sebagai:

- a) Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor impor yang mendukung PKN;
- b) Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten;
- c) Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau
- d) Kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan nasional.





BAB III

ANALISIS SWOT DAN ISU STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungpinang maupun hasil evaluasi terhadap RPJMD Tahun 2018 – 2023 serta perkembangan pembangunan yang ada saat ini, terdapat beberapa kekuatan, kelemahan, peluang sekaligus tantangan yang ada di Kota Tanjungpinang. Hal ini akan menjadi pertimbangan dalam menentukan konsep pembangunan Kota Tanjungpinang untuk periode 2024-2029. Analisis SWOT tersebut yaitu :

1. Kekuatan

Kekuatan adalah suatu kondisi yang ada di daerah dan dapat dianggap sebagai potensi. Kekuatan dan potensi tersebut dapat berupa sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Beberapa kekuatan yang dimiliki Kota Tanjungpinang diantaranya adalah :

- a. Geografis dan Geostrategis;
- b. Sumber Daya Alam;
- c. Pluralitas Sosial Budaya;
- d. Potensi Sumber Daya Manusia.

2. Kelemahan

Beberapa kelemahan yang dimiliki oleh Kota Tanjungpinang, diantaranya yaitu :

- a. Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah;
- b. Terbatasnya Infrastruktur dan Sarana Prasarana Wilayah;
- c. Masih tingginya Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan;



- d. Belum meratanya Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
- e. Belum Optimalnya Pengelolaan Sektor Unggulan Daerah;
- f. Belum Optimalnya Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- g. Belum Efektifnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya terkait Pelayanan Publik;
- h. Rendahnya Daya Saing.

3. Peluang

Beberapa peluang yang ada di Kota Tanjungpinang, diantaranya yaitu:

- a. Berbatasan Langsung dengan Negara Maju;
- b. Regulasi yang mendukung Percepatan dan Pemerataan Pembangunan;
- c. Pesatnya peluang Investasi;
- d. Kebutuhan pangsa pasar global yang semakin meningkat.

4. Tantangan

Adapun Tantangannya yaitu :

- a. Tuntutan Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Daerah;
- b. Distribusi Pembangunan secara Adil dan Merata;
- c. Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam;
- d. Pengelolaan Kawasan Pesisir;
- e. Kesiapan Sumber Daya Manusia.

Adapun beberapa Isu Strategis yaitu :

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi masih dipandang sebagai Isu Strategis, selain karena perkembangannya yang masih bersifat fluktuatif juga sejalan dengan Isu Strategis RPJPD terkait Potensi Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang tahun 2013 hingga tahun 2023 mengalami



perkembangan yang fluktuatif, dimana pada tahun 2013 menunjukkan pertumbuhan sebesar 7,78% dan menurun menjadi 4,92% pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang menempati posisi keempat terendah setelah Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Lingga.

Tabel
Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjungpinang

TAHUN	PERBANDINGAN LAJU PERTUMBUHAN		
	TANJUNGPINANG	PROVINSI KEPRI	NASIONAL
2019	3,27	4,83	5,02
2020	(-) 3,45	(-) 3,8	(-) 2,07
2021	3,7	3,43	3,7
2022	4,12	5,09	5,31
2023	4,92	5,2	5,05

Sumber Data BPS Kota Tanjungpinang Tahun 2024

Jika diperhatikan dari tabel diatas, terlihat upaya pemulihan ekonomi Pasca Pandemi COVID-19 belum sepenuhnya optimal. Tahun 2022 dan 2023 merupakan masa pemulihan ekonomi, namun Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjungpinang belum sepenuhnya optimal karena rata-rata Pertumbuhan Ekonomi masih diangka 4%, atau lebih rendah dari Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional yang sudah berada di posisi 5%.

2. Kemiskinan dan Pengangguran

RPJPD Kota Tanjungpinang Tahun 2025-2045 masih menjadikan permasalahan kesejahteraan masyarakat sebagai Isu Strategis Pembangunan di Kota Tanjungpinang. Maka hal ini juga menjadi rumusan Isu Strategis Pembangunan untuk periodeisasi 2025-2030, dengan konsentrasi pada permasalahan kemiskinan dan pengangguran.



VISI DAN MISI

H. LIS DARMANSYAH, SH – Drs. H. RAJA ARIZA, MM



BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG

Kendati Angka Kemiskinan dari tahun 2013 hingga 2023 cenderung mengalami penurunan, namun masih berada pada angka yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata Angka Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel
Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Tanjungpinang

TAHUN	PERBANDINGAN ANGKA KEMISKINAN		
	TANJUNGPINANG	PROVINSI KEPRI	NASIONAL
2019	9,03	5,80	9,22
2020	9,37	6,13	10,19
2021	9,57	5,75	9,71
2022	9,85	6,24	9,57
2023	7,95	5,69	9,36

Sumber Data BPS Kota Tanjungpinang Tahun 2024

Angka pengangguran Kota Tanjungpinang pada tahun 2013 hingga tahun 2023 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2020 angka pengangguran Kota Tanjungpinang mencapai sebesar 9,30%, namun kemudian terus menurun hingga di tahun 2023 menjadi 4,76%. Kendati mengalami penurunan, namun sifatnya yang masih bersifat fluktuatif sehingga masih memiliki potensi mengalami kenaikan kembali.

Tabel
Perkembangan Angka Pengangguran Kota Tanjungpinang

TAHUN	PERBANDINGAN ANGKA PENGANGGURAN		
	TANJUNGPINANG	PROVINSI KEPRI	NASIONAL
2019	5,64	7,5	4,44
2020	9,30	10,34	6,48
2021	6,31	9,91	6,49
2022	5,27	8,23	5,86
2023	4,76	6,8	5,32

Sumber Data BPS Kota Tanjungpinang Tahun 2024





3. Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur dan Prasarana Wilayah

Sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang masih banyak banyak kekurangan dalam hal Infrastruktur dan sarana prasarana wilayah. Diantaranya terkait Infrastruktur dan Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan, Sarana Publik, Penanganan Kawasan Kumuh, Jalan dan Jembatan, Akses air bersih, Sanitasi, Penanganan Banjir dan sebagainya. Untuk sarana prasarana Pendidikan dan Kesehatan, masih menjadi permasalahan serius yang perlu dibenahi seiring semakin berkembangnya jumlah penduduk dan kebutuhan akan pendidikan.

Begitu juga dengan permasalahan pendistribusian air bersih dan penanganan banjir yang belum optimal di sejumlah wilayah, yang perlu dilakukan pembenahan disamping peningkatan kualitas dan kuantitas Infrastruktur dan sarana prasarana wilayah.

Tabel
Ketersediaan dan Kebutuhan Air Bersih di Kota Tanjungpinang

KECAMATAN	KETERSEDIAAN AIR (M3/Tahun)	KEBUTUHAN AIR (M3/Tahun)	SELISIH	STATUS
BUKIT BESTARI	198.849.503	90.086.400	108.763.103	SURPLUS
TPI BARAT	21.726.831	33.960.000	-12.233.169	DEFISIT
TPI KOTA	263.300.752	73.684.800	189.615.952	SURPLUS
TPI TIMUR	274.385.384	184.827.200	89.558.184	SURPLUS

Sumber Rancangan Akhir RPJPD Kota Tanjungpinang

Tabel
Wilayah Rawan Banjir di Kota Tanjungpinang

KECAMATAN	LUAS GENANGAN (Ha)	PERSENTASE
BUKIT BESTARI	2,43	1,05
TANJUNGPINANG BARAT	13,74	5,93
TANJUNGPINANG KOTA	6,30	2,72
TANJUNGPINANG TIMUR	209,17	90,30

Sumber Rancangan Akhir RPJPD Kota Tanjungpinang



4. Kualitas Birokrasi dan Pelayanan Publik

Indeks Reformasi Birokrasi walaupun meningkat sejak tahun 2018 namun pada tahun 2022 baru mencapai angka yang cukup yaitu 69,30, Nilai SAKIP baru mencapai sebesar 73,27 pada tahun 2022, menurun dibandingkan tahun 2018 sebesar 77,6. Reformasi birokrasi perlu ditingkatkan untuk menciptakan sistem yang lebih responsif, efektif, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Reformasi birokrasi diharapkan mampu mengarah pada pencapaian kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan.

5. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas SDM yang belum optimal disebabkan oleh IPM Kota Tanjungpinang baru mencapai 76,94, yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- a) Tingkat Pendidikan penduduk yang belum optimal, karena masih adanya anak usia sekolah yang belum bersekolah dan belum semua anak melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- b) Belum optimalnya derajat Kesehatan masyarakat, karena masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan dan sarana kesehatan serta belum meratanya akses dan fasilitas kesehatan.
- c) Lapangan pekerjaan yang terbatas.

6. Kemandirian Keuangan Daerah

Pendapatan Daerah yang belum sepenuhnya optimal, dimana pada Tahun Anggaran 2023 jumlah realisasi Pendapatan Daerah hanya sebesar Rp.963.862.158.038,10,- atau 94,47% dari proyeksi APBD. Bahkan dari postur Pendapatan Daerah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya



teralisasi sebesar Rp.161.252.026.435,10,- atau hanya 16,73% dari total Pendapatan Daerah. Sementara total Pendapatan dari Transfer baik Dana Hasil, Dana Alokasi Umum maupun Dana Alokasi Khusus mencapai sebesar Rp. 792.914.687.501,- atau mencapai 82,27% dari total Pendapatan Daerah.

Dari gambaran postur Pendapatan Daerah tersebut, terlihat bahwa Keuangan Daerah Kota Tanjungpinang belum memiliki kemandirian karena masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi pada Dana Transfer.

Tabel
Postur Pendapatan Daerah Kota Tanjungpinang

POSTUR PENDAPATAN DAERAH		REALISASI TAHUN 2023
PENDAPATAN DAERAH		963.862.158.038,10
PENDAPATAN ASLI DAERAH		161.252.026.435,10
1	Pajak Daerah	91.903.421.978,00
2	Retribusi Daerah	6.540.504.424,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.852.077.879,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	59.956.022.154,10
PENDAPATAN TRANSFER		792.914.687.501,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		9.695.444.102,00

Sumber LKPJ Kepala Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2023

7. Implementasi Budaya Melayu.

Sebagai tapak sejarah Kesultanan Melayu Riau Lingga, Kota Tanjungpinang memiliki potensi budaya yang cukup tinggi untuk dilestarikan dan dikembangkan. Selain itu Budaya Melayu memiliki karakteristik yang dapat diimplementasikan kedalam nuansa pembangunan, sehingga dapat menjadi identitas pembangunan Kota Tanjungpinang. Namun selama ini implementasinya masih belum optimal, dimana wajah Ibukota Provinsi Kepri ini belum sepenuhnya optimal mencerminkan nuansa-nuansa Budaya Melayu.



VISI DAN MISI

H. LIS DARMANSYAH, SH – Drs. H. RAJA ARIZA, MM



BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG

Adapun Permasalahan Pembangunan diuraikan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu :

1. Urusan Pendidikan

- a. Angka rata-rata lama sekolah yang belum optimal;
- b. Belum terpenuhinya standar sarana prasarana sekolah yang memadai, serta keterbatasan sekolah yang tidak merata dan proporsional;
- c. Tidak sebandingnya pertumbuhan jumlah peserta didik dengan ketersediaan sekolah yang ada;
- d. Belum optimalnya penerapan pendidikan berkarakter yang mensinergikan antara pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pendidikan keagamaan maupun akhlak dan budi pekerti.

2. Urusan Kesehatan

- a. Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB);
- b. Belum optimalnya pelayanan kesehatan berbasis jaminan kesehatan (BPJS), dimana masih banyaknya masyarakat tidak mampu yang tidak terdaftar sebagai penerima manfaat jaminan kesehatan;
- c. Belum optimalnya penerapan jaminan kesehatan gratis kepada masyarakat tidak mampu, dimana masih adanya pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung BPJS seperti peralatan medis maupun obat-obatan tertentu;
- d. Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur, sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan dasar maupun rumah sakit rujukan;
- e. Belum optimalnya penyebaran tenaga kesehatan khususnya di Puskesmas;





- f. Belum optimalnya pelaksanaan upaya-upaya preventif dan pengembangan lingkungan sehat pada pembangunan kesehatan di Kota Tanjungpinang khususnya dalam pemanfaatan dan optimalisasi peran Posyandu;

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

- a. Belum optimalnya pemerataan infrastruktur diseluruh wilayah Kota Tanjungpinang, sehingga menimbulkan ketimpangan pembangunan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya;
- b. Belum optimalnya kualitas pembangunan akses jalan/jembatan;
- c. Belum optimalnya pendistribusian air bersih melalui jaringan perpipaan yang merata diseluruh wilayah Kota Tanjungpinang;
- d. Belum optimalnya penanganan banjir;
- e. Banyaknya infrastruktur yang dibangun tapi tidak terkelola dengan baik, bahkan tidak adanya perawatan / pemeliharaan baik pada bangunan maupun jembatan.

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

- a. Belum optimalnya pemerataan sarana prasarana wilayah;
- b. Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh perkotaan;
- c. Belum optimalnya penyediaan air bersih dan sanitasi pada kawasan padat pemukiman masyarakat serta wilayah pesisir;
- d. Belum optimalnya pengembangan kawasan dan peningkatan sarana prasarana pada pemukiman masyarakat diwilayah pesisir;



5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- a. Rendahnya kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum yang berlaku serta lemahnya penegakan produk hukum daerah;
- b. Belum optimalnya upaya preventif dalam penanganan potensi kebakaran dan rawan bencana serta rendahnya pengembangan kawasan akibat kebakaran dan akibat dampak bencana;
- c. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM penanggulangan bencana, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.

6. Urusan Sosial

- a. Belum optimalnya pendataan masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga masih banyaknya data yang tidak update dengan fakta dilapangan;
- b. Belum optimalnya penanganan kesejahteraan sosial bagi masyarakat khususnya kelompok miskin ataupun dengan kategori rawan miskin;
- c. Belum optimalnya pembinaan terhadap kelompok Disabilitas;
- d. Kurangnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam upaya pengentasan kemiskinan.

7. Urusan Ketenagakerjaan

- a. Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka, serta belum optimalnya pendataan jumlah pengangguran yang dilakukan secara berkala;
- b. Kurangnya Sumber Daya Manusia berkualitas yang memiliki daya saing;



- c. Kurang optimalnya pelatihan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan lapangan kerja;
- d. Tidak sebandingnya jumlah pengangguran dengan ketersediaan lapangan kerja.

8. Urusan Koperasi dan UMKM

- a. Belum optimalnya pengembangan dan upaya penyehatan Koperasi;
- b. Belum optimalnya pengembangan dan pembinaan usaha kecil dan menengah khususnya dalam dukungan permodalan dan pemasaran produk UMKM;
- c. Kurangnya pembinaan dan fasilitasi terhadap upaya pengembangan IKM, termasuk dalam hal pelatihan-pelatihan yang komprehensif sesuai standar mutu yang diperlukan pangsa pasar.

9. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

- a. Kurang optimalnya upaya preventif dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- b. Kurang optimalnya pemberdayaan organisasi perempuan dalam pembangunan berbasis kreativitas yang dimiliki;
- c. Belum optimalnya pendistribusian tenaga kerja perempuan pada lapangan kerja maupun melalui pelatihan-pelatihan ketenagakerjaan;
- d. Belum optimalnya pemenuhan hak anak termasuk anak berkebutuhan khusus (disabilitas).

10. Urusan Pertanian dan Pangan

- a. Belum adanya regulasi daerah yang mengatur terkait ketersediaan dan ketahanan pangan serta lalu lintas distribusi pangan;



- b. Belum optimalnya penataan pada kawasan pertanian, serta kurangnya pembinaan terhadap para petani;
- c. Ketergantungan bahan pangan dari luar daerah/luar negeri;

11. Urusan Lingkungan Hidup

- a. Pencemaran Lingkungan yang masih cukup tinggi akibat dampak pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam;
- b. Lemahnya pengawasan pelaksanaan AMDAL;
- c. Belum optimalnya pengelolaan limbah dan persampahan;
- d. Kurang optimalnya pemanfaatan dan penataan kawasan resapan air;
- e. Belum optimalnya penataan kawasan hijau, serta sinergitas kebijakan dalam menciptakan lingkungan yang bersih, aman dan nyaman.

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Belum optimalnya penerbitan dokumen kependudukan khususnya Akte Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), serta Akte Kematian bagi masyarakat yang sudah meninggal dunia;
- b. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik khususnya terkait pengurusan dokumen-dokumen kependudukan;
- c. Rendahnya kesadaran aparatur pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara ramah, efektif dan efisien.

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Belum optimalnya upaya dalam meningkatkan kapastitas masyarakat sebagai subjek pembangunan;
- b. Belum optimalnya pembinaan dan fasilitasi terhadap upaya pengembangan Teknologi Tepat Guna.



14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Belum optimalnya kebijakan pengendalian urbanisasi penduduk antar wilayah dalam Kota maupun dari luar daerah;
- b. Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat KB.

15. Urusan Perhubungan

- a. Persentase kawasan tertib perparkiran masih terdapat permasalahan yakni kurangnya fasilitas perparkiran antara lain marka parkir dan rambu - rambu parkir;
- b. Kemacetan lalu lintas akibat keterbatasan akses jalan yang sempit, sementara pertumbuhan kendaraan bermotor semakin meningkat;
- c. Belum optimalnya infrastruktur akses jalan pada kawasan-kawasan rawan kemacetan, sehingga dibutuhkan pembangunan flyover pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi kemacetan;
- d. Kurangnya ketersediaan fasilitas keselamatan angkutan darat. Kondisi rambu lalu lintas dan fasilitas keselamatan jalan masih kurang;
- e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan Uji /KIR sehingga banyak komponen yang seharusnya di perbaharui namun tidak terlaksana.

16. Komunikasi dan Informatika

- a. Belum optimalnya pendistribusian informasi rencana maupun hasil pembangunan kepada masyarakat melalui media komunikasi dan informasi, dimana nilai keterbukaan informasi Kota Tanjungpinang belum sepenuhnya optimal;
- b. Belum terintegrasinya ketersediaan sumber data dan informasi sesuai standar Satu Data Indonesia, sehingga hal ini menyebabkan banyak



sumber data primer yang berbeda antara satu lembaga/insitusi dengan lembaga/insitusi lainnya. Hal ini berdampak pada pendistribusian dan pelaksanaan program pembangunan yang sering tidak tepat sasaran;

- c. Belum optimalnya pemanfaatan E-Government yang terintegritas.

17. Urusan Penanaman Modal

- a. Belum optimalnya sarana prasarana pendukung Investasi, sehingga nilai penanaman nodal yang masih rendah;
- b. Belum optimalnya pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan FTZ, serta kurangnya promosi investasi yang disesuaikan dengan kondisi daerah;
- c. Belum optimalnya pelayanan Terpadu Satu Pintu.

18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- d. Belum optimalnya pemberdayaan organisasi-organisasi kepemudaan dalam Pembangunan;
- e. Kurangnya optimalisasi peran pemuda dalam kesiapannya mengisi lapangan pekerjaan maupun pengembangan semangat entrepreneur dalam upaya pengembangan kemandirian kepemudaan;
- f. Tidak adanya sarana prasarana dalam pengembangan kreatifitas kepemudaan dan kelompok milenial;
- g. Kurangnya sarana prasarana olahraga yang memadai dan lengkap bagi menunjang kreatifitas dan kualitas bidang olahraga serta kurangnya perhatian dan apresiasi bagi upaya peningkatan kesejahteraan para atlet.

19. Urusan Kebudayaan

- a. Belum optimalnya pengembangan budaya yang ada, dengan menjadikan Budaya Melayu sebagai Payung bagi Budaya lainnya;



- b. Belum optimalnya sinergitas dalam upaya pelestarian dan pengembangan kawasan cagar budaya maupun kesenian dan budaya yang ada dengan pengembangan pariwisata berbasis kebudayaan dan sejarah;
- c. Belum optimalnya upaya pengembangan dan pembinaan terhadap sanggar-sanggar budaya serta fasilitasi terhadap para seniman budaya Melayu.

20. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

- a. Rendahnya minat baca masyarakat, serta kurangnya inovasi dalam upaya meningkatkan minat baca melalui sistem digitalisasi;
- b. Belum optimalnya pengelolaan kearsipan.

21. Urusan Kelautan dan Perikanan

- c. Belum optimalnya pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan;
- d. Belum optimalnya pengolahan sumber daya perikanan;'
- e. Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan nelayan maupun pengamanan dan keamanan bagi para nelayan;
- f. Kurangnya sarana prasarana bagi nelayan khususnya di wilayah pesisir;

22. Urusan Pariwisata

- a. Belum optimalnya pelaksanaan grand desain pengembangan Pariwisata;
- b. Belum optimalnya pemanfaatan, pengembangan dan pembangunan kawasan-kawasan wisata baru berbasis maritim, budaya dan sejarah;
- c. Belum optimalnya dan meratanya penyediaan sarana prasarana public yang mendukung sektor Pariwisata dalam hal event-event dan promosi wisata;



23. Urusan Perindustrian dan Perdagangan

- a. Belum optimalnya pengembangan kawasan-kawasan perdagangan yang disertai dengan infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai;
- b. Belum optimalnya upaya pengendalian Inflasi khususnya pada waktu-waktu tertentu seperti perayaan hari besar Agama;
- c. Belum optimalnya pengelolaan produk perdagangan dan industri berbasis potensi daerah;
- d. Belum optimalnya ketesersediaan sarana prasarana penunjang pengembangan sektor industri, baik skala besar maupun IKM;
- e. Minimnya peluang pangsa pasar produk IKM yang disebabkan kurangnya kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara ke Kota Tanjungpinang.

24. Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

- a. Belum optimalnya perencanaan pembangunan berbasis isu strategis dan permasalahan pembangunan;
- b. Belum optimalnya implementasi setiap perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan proses penganggaran dan pelaksanaan;
- c. Belum optimalnya sinergitas antar dokumen perencanaan pembangunan, baik RPJPD, RPJMD, Renstra dan Renja OPD maupun Perencanaan lainnya seperti RTRW, RPIK dan sebagainya;
- d. Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan lebih berorientasi pada penyerapan anggaran daripada kemanfaatan maupun dampaknya bagi permasalahan pembangunan sebagaimana yang ditetapkan dalam setiap dokumen perencanaan;



- e. Belum optimalnya penelitian dan pengembangan dan penerapan sistem inovasi daerah.

25. Urusan Keuangan Daerah

- a. Belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana postur Pendapatan Daerah lebih didominasi oleh Dana Transfer;
- b. Belum optimalnya upaya peningkatan sektor Pajak dan Retribusi Daerah, serta rendahnya Inovasi yang dilakukan dalam mengelolah sumber-sumber Pendapatan Daerah;
- c. Belum optimalnya inventarisasi Asset Daerah, serta pengelolaannya dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- d. Belum optimalnya perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah, sehingga tidak sejalan dengan perencanaan pembangunan sesuai target yang ditetapkan.

26. Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

- a. Belum optimalnya pendistribusian SDM Aparatur Pemerintahan berbasis kompetensi dan pendidikan dengan jabatan maupun tugas dan fungsi OPD;
- b. Belum optimalnya peningkatan kualitas pegawai berbasis pendidikan dan kompetensi;
- c. Belum optimalnya penyusunan database kepegawaian serta perhitungan kebutuhan kepegawaian pada masing-masing ruang lingkup tugas pemerintahan;
- d. Disiplin Pegawai yang belum optimal serta lemahnya karakter Aparatur Pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan yang efektif dan melayani.

**27. Sekretariat DPRD**

- a. Belum optimalnya pelayanan Sekretariat DPRD dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran yang dilakukan oleh DPRD;
- b. Belum optimalnya sarana prasarana penunjang kinerja DPRD, serta rendahnya kualitas dan kapasitas dalam penyediaan jasa Tenaga Ahli dalam mendukung kerja Alat Kelengkapan DPRD.

28. Sekretariat Daerah

- a. Belum optimalnya pelayanan Sekretariat Daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pelayanan publik;
- b. Belum optimalnya akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis kinerja;
- c. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tiap urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD.

29. Pengawasan

- a. Kurang optimalnya pengawasan internal pemerintahan sehingga potensi penyalahgunaan anggaran dan kewenangan masih cukup tinggi;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dalam memastikan penyelenggaraan Pemerintahan berjalan sesuai perencanaan Pembangunan.

30. Kecamatan

Belum optimalnya kualitas pelayanan publik berbasis E-Government yang efektif, efisien, mudah dan cepat.



VISI DAN MISI

H. LIS DARMANSYAH, SH – Drs. H. RAJA ARIZA, MM



BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG

BAB IV VISI DAN MISI

Visi dan Misi selain mengacu pada analisis SWOT Daerah serta Isu – Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan yang telah diuraikan pada BAB III, juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungpinang. Adapun Visi RPJPD Kota Tanjungpinang Tahun 2025-2045 yaitu **“Kota Pendidikan, Pusat Perdagangan dan Pariwisata yang Maju, Berbudaya, Sejahtera dan Berkelanjutan”**.

Adapun Visi Misi **H. Lis Darmansyah, SH** dan **Drs. H. Raja Ariza, MM** sebagai Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan Tagline **“Tanjungpinang Berbenah”** melalui **VISI BIMA SAKTI “Berbenah menuju Tanjungpinang Kota yang Berbudaya, Indah, Melayani dan Aman untuk mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Agamis, Kreatif, ber-Teknologi dan ber-Integritas”**. Dengan kandungan makna, yaitu :

Berbudaya

Bahwa Kota Tanjungpinang merupakan tapak sejarah Kesultanan Melayu Riau Lingga, yang harus senantiasa mempertahankan jati dirinya sebagai Kota yang menjunjung tinggi Adat Budaya Melayu sebagai Perisai Negeri.

Indah

Bahwa Kota Tanjungpinang merupakan Ibukota Provinsi Kepulauan Riau, sehingga harus bisa sejajar dengan kota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia. Maka pembangunannya harus mengarah pada pengembangan kota yang Indah dan representative bagi masyarakat yang mendiaminya.





VISI DAN MISI

H. LIS DARMANSYAH, SH – Drs. H. RAJA ARIZA, MM



BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG

Melayani

Bahwa untuk mewujudkan Kota Tanjungpinang yang representative, maka Tanjungpinang harus menjadi Kota yang dapat melayani dengan baik setiap masyarakatnya. Melayani dalam hal pelayanan publik maupun melayani dalam menyuguhkan hasil-hasil pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Aman

Bahwa kehidupan di Kota Tanjungpinang harus bisa memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi setiap masyarakat, maka dengan upaya menciptakan Kota yang Aman akan mendorong terciptanya kota yang tenang dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas.

Sejahtera

Tujuan hakiki dari pembangunan semata-mata adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dengan pembenahan Kota Tanjungpinang diharapkan akan mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Agamis

Mewujudkan Masyarakat yang Agamis menjadi penting untuk dilakukan, seiring dinamika pembangunan dan ancaman dehidrasi moral akibat perkembangan globalisasi.

Kreatif

Pembangunan harus mengarah pada penguatan SDM Daerah yang bertumpuh pada potensi yang dimiliki, sehingga menumbuhkan masyarakat yang kreatif, mandiri dan memiliki daya saing.





VISI DAN MISI

H. LIS DARMANSYAH, SH – Drs. H. RAJA ARIZA, MM



BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG

ber - Teknologi

Seiring perkembangan Pembangunan di era digitalisasi, tuntutan akan penguasaan teknologi menjadi mutlak untuk dilakukan bukan hanya oleh pelaku pembangunan tetapi juga oleh masyarakat. Maka penguasaan teknologi oleh masyarakat juga diperlukan, sehingga sinergitas pembangunan di era digitalisasi dapat lebih dioptimalkan.

ber – Integritas

Kota yang maju tidak hanya didukung oleh pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang berkembang, namun juga oleh kualitas masyarakatnya. Kualitas tersebut dibentuk bukan hanya berdasarkan tingkat pendidikan maupun tingkat kesejahteraan, tetapi juga masyarakat yang berintegritas. Oleh karena itu, diperlukan masyarakat yang berintegritas dalam berbagai aspek kehidupan.

SINERGITAS VISI RPJPD KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2025 – 2045 DENGAN VISI LIS - RAJA UNTUK RENCANA PEMBANGUNAN 2025 – 2030

MUATAN VISI RPJPD	MUATAN VISI LIS – RAJA
KOTA PENDIDIKAN	AMAN, KREATIF, BER-TEKNOLOGI
PUSAT PERDAGANGAN	MELAYANI, BER-TEKNOLOGI
PUSAT PARIWISATA	INDAH, KREATIF
BERBUDAYA	BERBUDAYA, AGAMIS, BER-INTEGRITAS
SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN	AMAN, SEJAHTERA, KREATIF,

Visi H. Lis Darmansyah, SH dan Drs. H. Raja Ariza, MM juga memiliki korelasi dalam mewujudkan Visi RPJPD pada periodeisasi pertama, yaitu **Perkuatan Fondasi Transformasi menuju Tanjungpinang Kota Pendidikan, Pusat Perdagangan dan Pariwisata yang maju, Berbudaya. Sejahtera dan Berkelanjutan.**





VISI DAN MISI

H. LIS DARMANSYAH, SH – Drs. H. RAJA ARIZA, MM



BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG

Untuk mewujudkan Visi H. Lis Darmansyah, SH dan Drs. H. Raja Ariza, MM, telah dirumuskan 5 (lima) Misi yaitu :

1. Pembinaan Kota Tanjungpinang menjadi Kota yang representative pada semua bidang pembangunan dalam nuansa budaya melayu, serta meningkatkan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana wilayah berbasis kearifan lokal yang berwawasan lingkungan.
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkompetensi tinggi dan memiliki daya saing, melalui pengembangan sistem pendidikan formal dan informal, peningkatan pelayanan kesehatan, menumbuhkan kewirausahaan secara mandiri, memperkuat kesetaraan gender, serta pemberdayaan generasi muda/kaum mellenial.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang produktif, mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru dengan bertumpu pada kemandirian usaha serta pemanfaatan sumber daya secara optimal.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis kinerja aparatur pemerintahan yang bersih, modern, profesional, berintegritas serta berorientasi melayani.
5. Mewujudkan masyarakat yang religius, tertib, berintegritas dan berbudaya berbasis toleransi, dalam bingkai budaya melayu sebagai pemersatu.

Adapun korelasi antara Visi dan Misi yaitu :

VISI	KORELASI PADA URUTAN MISI
BERBUDAYA	MISI KE – 1 DAN MISI KE – 5
INDAH	MISI KE – 1
MELAYANI	MISI KE – 2 DAN MISI KE – 4
AMAN	MISI KE – 5
SEJAHTERA	MISI KE – 2 DAN MISI KE – 3
AGAMIS	MISI KE – 5
KREATIF	MISI KE – 2 DAN MISI KE – 3
TEKNOLOGI	MISI KE – 2 DAN MISI KE – 3
INTEGRITAS	MISI KE – 4 DAN MISI KE – 5





VISI DAN MISI

H. LIS DARMANSYAH, SH – Drs. H. RAJA ARIZA, MM



BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG

**KORELASI ISU STRATEGIS
DENGAN MISI H. LIS DARMANSYAH, SH DAN Drs. H. RAJA ARIZA, MM**

ISU STRATEGIS	MISI
Pertumbuhan Ekonomi	Pembenahan Kota Tanjungpinang menjadi Kota yang representative pada semua bidang pembangunan dalam nuansa budaya melayu, serta meningkatkan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana wilayah berbasis kearifan lokal yang berwawasan lingkungan
Infrastruktur dan Prasarana Wilayah	
Implementasi Budaya Melayu	
Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkompetensi tinggi dan memiliki daya saing, melalui pengembangan sistem pendidikan formal dan informal, peningkatan pelayanan kesehatan, menumbuhkan kewirausahaan secara mandiri, memperkuat kesetaraan gender, serta pemberdayaan generasi muda/mellenial
Kemiskinan dan Pengangguran	
Pertumbuhan Ekonomi	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang produktif, mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru dengan bertumpu pada kemandirian usaha serta pemanfaatan sumber daya secara optimal.
Kemiskinan dan Pengangguran	
Kualitas Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis kinerja aparatur pemerintahan yang bersih, modern, profesional, berintegritas serta berorientasi melayani
Kemandirian Keuangan Daerah	
Implementasi Budaya Melayu	Mewujudkan masyarakat yang religius, tertib, berintegritas dan berbudaya berbasis toleransi, dalam bingkai budaya melayu sebagai pemersatu

Dari tabel tersebut telah memberikan gambaran bahwa dari 7 Isu Strategis telah terjawab dalam 5 (lima) Misi yang akan dijalankan. Begitu juga dalam kaitannya dengan permasalahan pembangunan pada masing-masing urusan pemerintahan, telah dirangkum dalam 5 Misi yang nantinya akan dijabarkan kedalam beberapa Tujuan, Sasaran dan Arah Pembangunan.





VISI DAN MISI

H. LIS DARMANSYAH, SH – Drs. H. RAJA ARIZA, MM



BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG

SINERGITAS MISI H. LIS DARMANSYAH, SH DAN Drs. H. RAJA ARIZA, MM DENGAN MISI RPJPD KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2025 – 2045

MISI BIMA SAKTI

Pembenahan Kota Tanjungpinang menjadi Kota yang representative pada semua bidang pembangunan dalam nuansa budaya melayu, serta meningkatkan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana wilayah berbasis kearifan lokal yang berwawasan lingkungan.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkompetensi tinggi dan memiliki daya saing, melalui pengembangan sistem pendidikan formal dan informal, peningkatan pelayanan kesehatan, menumbuhkan kewirausahaan secara mandiri, memperkuat kesetaraan gender, serta pemberdayaan generasi muda/kaum mellenial

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang produktif, mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru dengan bertumpu pada kemandirian usaha serta pemanfaatan sumber daya secara optimal

Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis kinerja aparatur pemerintahan yang bersih, modern, profesional, berintegritas serta berorientasi melayani

Mewujudkan masyarakat yang religius, tertib, berintegritas dan berbudaya berbasis toleransi, dalam bingkai budaya melayu sebagai pemersatu

MISI RPJPD

Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Sumber daya manusia yang Berkualitas, Agamis/Religius, Produktif dan Berdaya Saing

Mewujudkan Transformasi Ekonomi dengan Sumber Daya Berkualitas secara bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat

Mewujudkan Tranformasi Tata Kelola Menuju pemerintahan yang Modern, Bersih, Akuntabel, Tangkas dan Kolaboratif

Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi

Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Mewujudkan dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Memantapkan keamanan daerah tangguh, Demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah

Mewujudkan kesinambungan pembangunan untuk mengawal Pencapaian Indonesia Emas





BAB V

TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan sasaran yaitu rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan Daerah yang diharapkan dalam perencanaan yang telah dilakukan.

Dari 5 (lima) Misi yang telah dikemukakan pada BAB IV, dijabarkan pada beberapa Tujuan dan Sasaran yaitu :

MISI I	
Pembenahan Kota Tanjungpinang menjadi Kota yang representative pada semua bidang pembangunan dalam nuansa budaya melayu, serta meningkatkan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana wilayah berbasis kearifan lokal yang berwawasan lingkungan	
TUJUAN	SASARAN
Mengimplementasi Budaya Melayu	Terintegrasinya Budaya Melayu sebagai Identitas Pembangunan dalam semua sektor.
Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana wilayah berbasis kearifan lokal.	Optimalnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
	Pembangunan yang berbasis Kearifan Lokal.
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Wilayah.
	Tersedianya akses jalan, jembatan dan pelabuhan yang representative.
	Terpelihara dan terkelolanya dengan baik asset-asset daerah guna menunjang kualitas pembangunan.
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.	Menurunnya kawasan kumuh.
	Terdistribusinya air bersih secara merata.
	Terciptanya lingkungan hidup yang bersih, sehat, asri, nyaman dan aman.
	Tersedianya ruang terbuka hijau yang representative dan nyaman.
	Tertanganinya masalah banjir dan permasalahan persampahan.



VISI DAN MISI

H. LIS DARMANSYAH, SH – Drs. H. RAJA ARIZA, MM



BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG

MISI II

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkompetensi tinggi dan memiliki daya saing, melalui pengembangan sistem pendidikan formal dan informal, peningkatan pelayanan kesehatan, menumbuhkan kewirausahaan secara mandiri, memperkuat kesetaraan gender, serta pemberdayaan generasi muda/kaum millennial

TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan Pengembangan Sistem Pendidikan Formal dan Informal.	Terciptanya sistem pendidikan formal dan informal yang berkualitas dan merata. Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS), serta menurunnya Angka Anak Putus Sekolah.
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Pendidikan.	Tersedianya sarana prasarana dan fasilitas sekolah yang memadai, representative dan merata dengan daya dukung pengajar yang kompeten dan inovatif.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan pelayanan kesehatan.	Tersedianya sarana prasarana dan fasilitas Rumah Sakit dan Puskesmas yang representative dan merata dengan daya dukung tenaga kesehatan yang kompeten. Terciptanya pelayanan kesehatan yang prima, efektif dan efisien dengan daya dukung petugas yang melayani serta berbasis digitalisasi. Terintegrasinya DTKS dengan Jaminan Kesehatan, serta jaminan kesehatan 100% bagi masyarakat yang tidak mampu. Meningkatnya peran Posyandu sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan khususnya dalam upaya pencegahan stunting.
Meningkatkan Kewirausahaan Muda yang mandiri dan Berdaya Saing.	Meningkatnya jumlah Pemuda Pelopor yang berwirausaha secara mandiri. Meningkatnya produk hasil kreativitas wirausaha berbasis potensi lokal.
Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Anak	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan khususnya dalam sektor ekonomi. Meningkatnya upaya terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak.
Meningkatkan peran serta generasi muda dan dalam Pembangunan	Meningkatnya partisipasi generasi muda dan kelompok millennial dalam pembangunan khususnya dalam mengaktualisasikan minat dan bakat pada hal-hal yang bersifat positif. Meningkatnya sarana prasarana pendukung aktivitas kepemudaan dan olahraga serta ruang ekspresi terhadap kaum millennial dan Kelompok Anak Disabilitas.





VISI DAN MISI

H. LIS DARMANSYAH, SH – Drs. H. RAJA ARIZA, MM



BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG

MISI III	
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang produktif, mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru dengan bertumpu pada kemandirian usaha serta pemanfaatan sumber daya secara optimal.	
TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi produktif.	Meningkatnya jumlah IKM secara mandiri dan memiliki daya saing.
	Meningkat dan berkembangnya sektor UMKM berbasis kreativitas dan potensi lokal.
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk IKM dan UMKM yang masuk ke pangsa lokal, nasional dan internasional.
	Tersedianya pusat-pusat perdagangan lokal berbasis produk khas Kota Tanjungpinang.
Meningkatkan Pengembangan Sektor Pariwisata berbasis keunggulan wilayah dan sejarah.	Meningkatnya sarana prasarana penunjang pada kawasan destinasi wisata.
	Terbangunnya kawasan destinasi wisata baru pada situs-situs cagar budaya.
	Terciptanya destinasi wisata baru pada kawasan perairan dan mangrove.
	Terintegrasinya kawasan destinasi wisata dengan pusat perdagangan produk UMKM.
	Terlaksananya event-event wisata dan promosi wisata berstandar nasional dan internasional.
Meningkatkan Pengembangan Sektor Perdagangan dan Industri	Terciptanya kawasan-kawasan perdagangan dan industri, dengan daya dukung sarana prasarana yang representative.
	Meningkatnya sarana prasarana penunjang pada pusat-pusat perdagangan tradisional (pasar).
	Terjaminnya pasokan kebutuhan masyarakat khususnya sembilan bahan pokok, serta terkendalinya Inflasi Daerah.
Meningkatkan Pengembangan Sektor Perikanan dan Pertanian	Meningkatnya Indeks Nilai Tukar Petani dan Nelayan
	Tersedianya Pusat Pengolahan Hasil Perikanan dan Pertanian
Meningkatkan Keterampilan dan Kapasitas Tenaga Kerja	Tersedianya Balai Latihan Kerja yang representative dengan daya dukung kurikulum pelatihan yang berdaya saing
Optimalisasi Sumber Daya Alam	Terehabilitasinya kawasan – kawasan pasca tambang
	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya alam menjadi sektor-sektor unggulan





VISI DAN MISI

H. LIS DARMANSYAH, SH – Drs. H. RAJA ARIZA, MM



BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG

MISI IV	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis kinerja aparatur pemerintahan yang bersih, modern, profesional, berintegritas serta berorientasi melayani	
TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Pemerintahan	Terciptanya Sumber Daya Aparatur Pemerintahan yang memiliki kapasitas sesuai dengan pendidikan, kompetensi dan pengalaman sesuai bidang tugas dan fungsi
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Terciptanya SDM Aparatur Pemerintahan yang berkarakter melayani, profesional dan berintegritas.
	Terciptanya sistem digitalisasi dalam Pelayanan Publik secara lebih efektif dan efisien
	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terencana, Sistematis dan Terukur	Terciptanya sinergitas Perencanaan Pembangunan, Pelaksanaan, Penganggaran dan Pertanggungjawaban dalam pengelolaan pemerintahan berbasis Penyelesaian Permasalahan Pembangunan
	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari Sektor Pajak, Retribusi dan Pengelolaan Kekayaan Daerah
MISI V	
Mewujudkan masyarakat yang religius, tertib, berintegritas dan berbudaya berbasis toleransi, dalam bingkai budaya melayu sebagai pemersatu	
TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan Nilai-Nilai Religius dalam Kehidupan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Keagamaan secara Formal dan Informal
	Meningkatnya Program Kegiatan – Kegiatan Keagamaan
Meningkatkan Kerukukunan Antar Umat Beragama	Meningkatnya Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama
Meningkatkan Kerukukunan Antar Budaya dalam Bingkai Budaya Melayu	Meningkatnya Sinergitas antar Budaya
	Optimalisasi Peran Lembaga Adat Melayu
Meningkatkan Keamanan, Kenyamanan, Ketertiban dan Keteraturan di Masyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk taat hukum dan berintegritas
	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Perda
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan kehidupan yang tertib





VISI DAN MISI

H. LIS DARMANSYAH, SH – Drs. H. RAJA ARIZA, MM



BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG

**ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
UNTUK PERIODEISASI 2026 – 2030**

TAHUN	ARAH KEBIJAKAN
2026	Pembenahan Tata Kelola Pemerintahan, Kualitas Pelayanan Dasar, Optimalisasi Pelayanan Publik berbasis Digitalisasi serta Sarana Prasarana Wilayah berbasis Budaya Melayu
2027	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Pengembangan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Publik, Pengembangan Pusat Ekonomi, Pariwisata dan UMKM
2028	Peningkatan Kualitas Keagamaan dan Pengembangan Budaya, Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran, serta Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Potensi Daerah
2029	Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Sarana Prasarana Kawasan Perdagangan dan Industri serta Pengembangan Investasi dan lapangan Pekerjaan
2030	Terwujudnya masyarakat yang Sejahtera, Agamis, Kreatif, ber-Teknologi dan ber-Integritas





VISI DAN MISI

H. LIS DARMANSYAH, SH – Drs. H. RAJA ARIZA, MM



BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG

BAB VI

PROGRAM PRIORITAS PEMBENAHAN PEMBANGUNAN

SASARAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBENAHAN
Terintegrasinya Budaya Melayu sebagai Identitas Pembangunan dalam semua sektor	Penguatan Identitas Melayu dalam Aktivitas Pemerintahan dan Masyarakat serta Corak Melayu pada Bangunan Pemerintahan dan Sarana Prasarana Publik
	Terlaksananya Event-Event Lintas Budaya, yang mencerminkan keanekaragaman dan keharmonisan antar Budaya
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Wilayah	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan sarana prasarana wilayah serta Penataan kawasan kumuh pesisir yang ramah lingkungan berbasis kearifan lokal
Terdistribusinya air bersih secara merata	Penyediaan jaringan perpipaan secara merata pada kawasan pemukiman pesisir, serta Air Bersih Gratis bagi masyarakat yang tidak mampu
Terciptanya lingkungan hidup yang bersih, sehat, asri, nyaman dan aman.	Penataan kawasan perkotaan yang Indah, Bersih, Asri, Hijau, Ramah Lingkungan serta Bebas Banjir
Tersedianya ruang terbuka hijau yang representative dan nyaman.	Penyediaan ruang terbuka hijau yang representatif, serta penyediaan lahan pemakaman umum
Meningkatkan Pengembangan Sistem Pendidikan Formal dan Informal	Program Sekolah Gratis 100%
	Program Pendidikan Informal bagi anak-anak putus sekolah, berbasis kompetensi
Tersedianya sarana prasarana dan fasilitas sekolah yang memadai, representative dan merata dengan daya dukung pengajar yang kompeten dan inovatif	Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Sekolah yang merata dan berkualitas, sesuai proporsional kebutuhan tiap wilayah
	Penambahan Ruang Kelas Baru secara proporsional, sesuai kebutuhan jumlah siswa
	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tenaga Pendidik, serta pendistribusian Tenaga Pendidik secara merata dan proporsional
Tersedianya sarana prasarana dan fasilitas Rumah Sakit dan Puskesmas yang representative dan merata dengan	Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan yang merata dan berkualitas pada RSUD maupun Puskesmas





VISI DAN MISI

H. LIS DARMANSYAH, SH – Drs. H. RAJA ARIZA, MM



BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG

daya dukung tenaga kesehatan yang kompeten.	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tenaga Kesehatan, serta pendistribusian Tenaga Kesehatan secara merata dan proporsional
Terciptanya pelayanan kesehatan yang prima, efektif dan efisien dengan daya dukung petugas yang ramah dan melayani serta berbasis digitalisasi	Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan yang mudah dan efektif berbasis Digitalisasi
	Biaya Kesehatan Gratis 100% bagi masyarakat tidak mampu
Meningkatnya peran Posyandu sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan khususnya dalam upaya pencegahan stunting.	Peningkatan dan Pemerataan sarana prasarana Posyandu
	Penambahan Insentif bagi Kader Posyandu
Meningkatnya jumlah Pemuda Pelopor yang berwirausaha secara mandiri	Pembinaan dan Fasilitasi Kewirausahaan yang dikembangkan oleh Generasi Muda
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan khususnya dalam sektor ekonomi	Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Rumahan berbasis potensi lokal, oleh Kelompok Ibu Rumah Tangga
Meningkatnya partisipasi generasi muda dan kelompok millenial dalam pembangunan khususnya dalam mengaktualisasikan minat dan bakat pada hal-hal yang bersifat positif	Pengembangan dan Revitalisasi Gedung Gonggong sebagai Sentra Kreatifitas Kepemudaan, Olahraga, dan Aktivitas Kesenian dan Budaya
	Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Aktivitas dan Kreatifitas Kelompok Disabilitas
Meningkat dan berkembangnya sektor UMKM berbasis kreativitas dan potensi lokal	Pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat RT dan RW serta pembinaan dan fasilitasi bantuan modal usaha bagi UMKM
Terbangunnya kawasan destinasi wisata baru pada situs-situs cagar budaya	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Cagar Budaya Komplek Pemakaman Sungai Carang, sebagai Destinasi Wisata Sejarah
Terciptanya destinasi wisata baru pada kawasan perairan dan mangrove	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Wisata Apung di Sungai Carang
Meningkatkan Pengembangan Sektor Perikanan dan Pertanian	Tersedianya Pusat Pengolahan Hasil Perikanan dan Pertanian
Terciptanya sistem digitalisasi dalam Pelayanan Publik secara lebih efektif dan efisien	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih terukur berbasis E-Government dan Digitalisasi
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Keagamaan secara Formal dan Informal	Pembinaan dan peningkatan kualitas kehidupan beragama guna menumbuhkan masyarakat yang berakhlak





VISI DAN MISI

H. LIS DARMANSYAH, SH – Drs. H. RAJA ARIZA, MM



BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG

	Insentif bagi Imam Masjid, Guru Ngaji, Petugas Fardu Kifayah serta tokoh pendidik Informal pada Agama lainnya
Optimalisasi Peran Lembaga Adat Melayu	Pengembangan Gedung Lembaga Adat Melayu Kota Tanjungpinang
Optimalisasi Peran Organisasi Kemasyarakatan	Pembangunan Gedung Aktivitas Lintas Organisasi Kemasyarakatan

KARTU TANJUNGPINANG BERBENAH



Program Kartu Tanjungpinang Berbenah merupakan Program untuk pemenuhan tanggungjawab Pemerintah Daerah, terhadap hak dasar masyarakat khususnya bagi masyarakat yang tergolong kurang atau tidak mampu. Terdapat 5 Kategori dari kartu ini nantinya, yaitu :

- 1) **Kategori A**
Biaya Pendidikan Gratis 100% (Seragam Sekolah, Buku dan LKS)
- 2) **Kategori B**
Biaya Kesehatan Gratis 100% bagi Non Pengguna BPJS
- 3) **Kategori C**
Kartu Identitas Penerima Subsidi Biaya Air Bersih Gratis
- 4) **Kategori D**
Kartu Identitas Penerima Fasilitas Bantuan Modal Usaha
- 5) **Kategori E**
Kartu Identitas Penerima Insentif





VISI DAN MISI

H. LIS DARMANSYAH, SH – Drs. H. RAJA ARIZA, MM



BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG

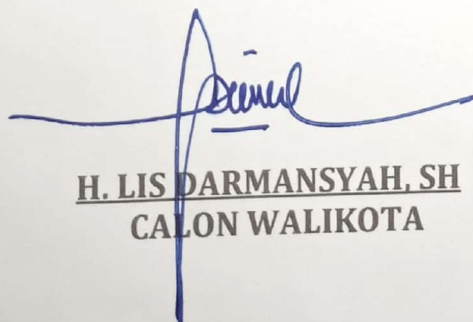
BAB VII PENUTUP

Demikian Visi dan Misi yang akan kami laksanakan, jika masyarakat Kota Tanjungpinang mengamanatkan kepada kami untuk memimpin Kota Tanjungpinang pada periode 2025 – 2030 mendatang.

Melakukan pembenahan terhadap Pembangunan Kota Tanjungpinang memang tidak mudah, dengan segala permasalahan pembangunan yang ada. Namun tidak ada yang sulit jika dimulai dengan niat, tekad, ikhtiar dan Visi Misi yang jelas, terukur dan realistis dalam memajukan Kota Tanjungpinang. Kami yakin dan optimis, kemajuan Kota Tanjungpinang akan dapat diwujudkan melalui sinergitas seluruh komponen daerah dengan mengoptimalkan segenap potensi dan keunggulan yang tersedia serta semangat kebersamaan dan gotong royong.

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, meridhoi niat dan ikhtiar ini dan senantiasa mencurahkan Rahmat-Nya bagi negeri ini dan kepada seluruh masyarakat di Kota Tanjungpinang. Aamiin ya Rabbal Alamiin.

**BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024**


**H. LIS DARMANSYAH, SH
CALON WALIKOTA**


**Drs. H. RAJA ARIZA, MM
CALON WAKIL WALIKOTA**

